



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

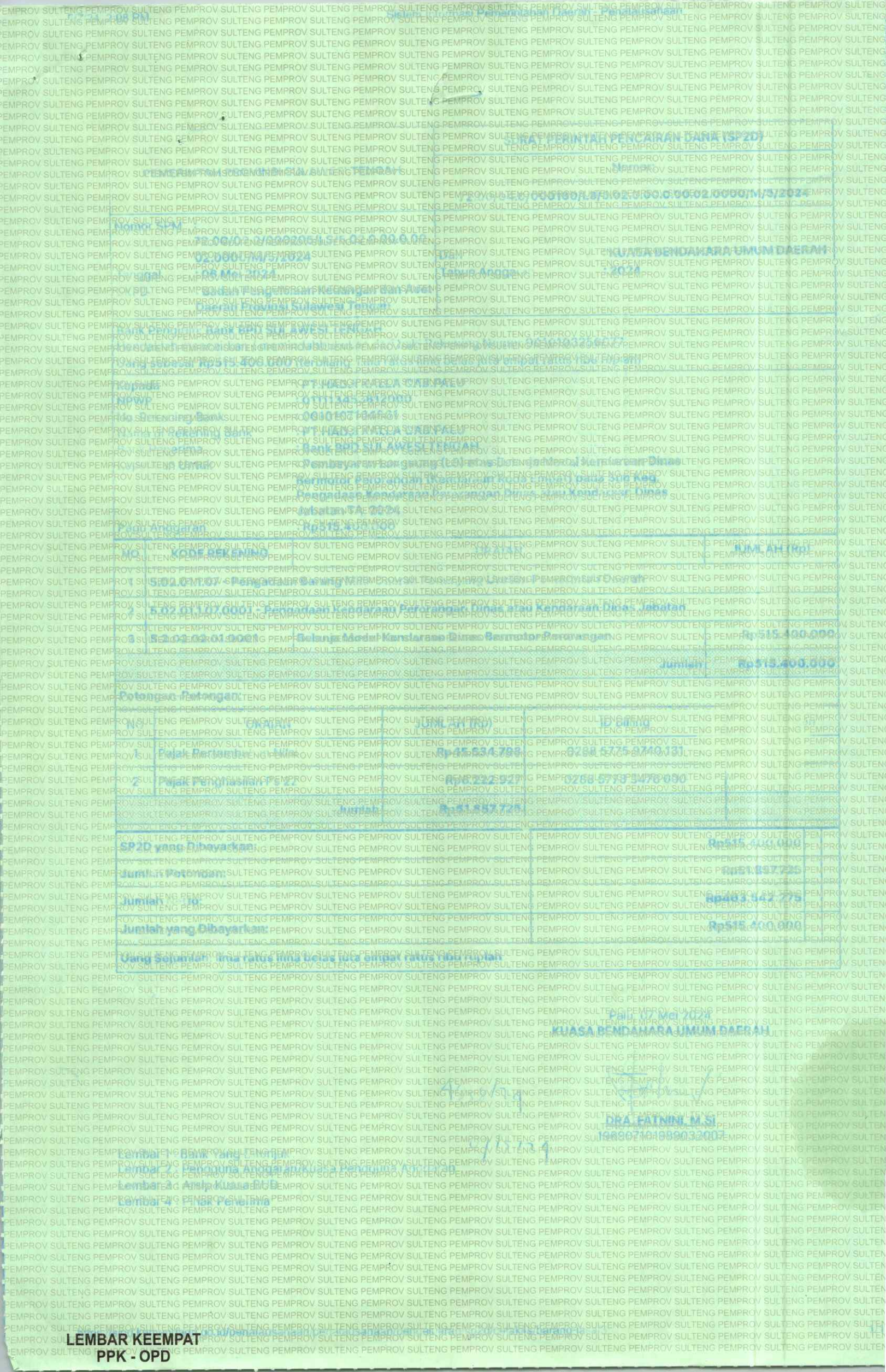
Jln. Dr. Sam Ratulangi No. 101 Palu 94111
Telp. (0451) 421411 – 421412 Faks. (0451) 421412 – 421411
Email : info@sultengprov.go.id, website : www.sultengprov.go.id

DOKUMEN BID. SEKRETARIAT

PAKET PEKERJAAN	:	BELANJA MODAL KENDARAAN DINAS BERMOTOR PERORANGAN (KENDARAAN RODA EMPAT)
SUB KEGIATAN	:	PENGADAAN KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN
NO. SP2D	:	72.00/04.0/000180/LS/5.02.0.00.00.02.0000/M/3/2024
TANGGAL SP2D	:	07 MEI 2024
NO. SPK/SP	:	027/6400/SP.I/BPKAD/2024
TANGGAL SPK/SP	:	05 APRIL 2024
JUMLAH NILAI	:	RP. 515.400.000
NAMA PERUSAHAAN	:	PT. HADJI KALLA
ALAMAT PERUSAHAAN	:	JL. JUANDA NO.45 KOTA PALU

TAHUN ANGGARAN

2024





NPWP : 00.139.337.0-831.000
NAMA : BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN A
ALAMAT : JL SAM RATULANGI - KOTA PALU

NOP : -
JENIS PAJAK : 411211
JENIS SETORAN : 920
MASA PAJAK : 05-05
TAHUN PAJAK : 2024
NOMOR KETETAPAN : -
JUMLAH SETOR : Rp.45.634.798 ✓
TERBILANG : Empat Puluh Lima Juta Enam Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah

URAIAN : PPN Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan (Kendaraan Roda 4)

NPWP PENYETOR : 00.139.337.0-831.000
NAMA PENYETOR : BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI

GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN.

ID BILLING : 0288 5775 9740 131
MASA AKTIF : 05/06/2024 10:23:08



Catatan : Apabila ada kesalahan dalam isian Kode Billing atau masa berlakunya berakhir, Kode Billing dapat dibuat kembali. Tanggung jawab isian Kode Billing ada pada Wajib Pajak yang namanya tercantum di dalamnya.

Data Pembayaran

Tanggal Dan Jam Bayar : 07/05/2024 15:40:07 NTB : 240507602405
Tanggal Buku : 08/05/2024 NTPN : 1AAED3IG765PTC73
Kode Cabang Bank : 001 - CABANG PALU STAN : 682485

Data Setoran

Kode Billing : 028857759740131
NPWP : 001393370831000
Nama Wajib Pajak : BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN A
Alamat : JL SAM RATULANGI - KOTA PALU
Jumlah Setoran : 45,634,798.00 Mata Uang : IDR
Terbilang : Empat Puluh Lima Juta Enam Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Sembilan
Jumlah Detail : Puluh Delapan Rupiah

This is computer generated message and requires no signature
Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan



NPWP : 01.111.345.3-831.001
NAMA : HADJI KALLA TRD COY
ALAMAT : JL.IR.HI.JUANDA NO.45, BESUSU TIMUR - KOTA PALU

NOP : -
JENIS PAJAK : 411122
JENIS SETORAN : 920
MASA PAJAK : 05-05
TAHUN PAJAK : 2024
NOMOR KETETAPAN : -
JUMLAH SETOR : Rp.6.222.927 /
TERBILANG : Enam Juta Dua Ratus Dua Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh
Tujuh Rupiah

URAIAN : PPh 22 Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan (Kendaraan
Roda 4)

NPWP PENYETOR : 00.139.337.0-831.000
NAMA PENYETOR : BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI

GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN.

ID BILLING : 0288 5778 3476 000
MASA AKTIF : 05/06/2024 10:52:10



Catatan : Apabila ada kesalahan dalam isian Kode Billing atau masa berlakunya berakhir, Kode Billing dapat dibuat kembali. Tanggung jawab isian Kode Billing ada pada Wajib Pajak yang namanya tercantum di dalamnya.

Data Pembayaran

Tanggal Dan Jam Bayar : 07/05/2024 15:40:35 NTB : 240507282491
Tanggal Buku : 08/05/2024 NTPN : 9EAC22M2NDBK44NPO
Kode Cabang Bank : 001 - CABANG PALU STAN : 282491

Data Setoran

Kode Billing : 028857783476000
NPWP : 011113453831001
Nama Wajib Pajak : HADJI KALLA TRD COY
Alamat : JL.IR.HI.JUANDA NO.45, BESUGU TIMUR - KOTA PALU
Jumlah Setoran : 6,222,927.00 Mata Uang : IDR
Terbilang : Enam Juta Dua Ratus Dua Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah
Jumlah Detail : 1

This is computer generated message and requires no signature
Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan



KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

CETAKAN KODE
BILLING

NPWP : 00.139.337.0-831.000
NAMA : BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN A
ALAMAT : JL SAM RATULANGI - KOTA PALU

NOP : -
JENIS PAJAK : 411122
JENIS SETORAN : 900
MASA PAJAK : 04-04
TAHUN PAJAK : 2024
NOMOR KETETAPAN : -
JUMLAH SETOR : Rp.6.222.927
TERBILANG : Enam Juta Dua Ratus Dua Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh
Tujuh Rupiah

URAIAN : 020.005-24.09215850

NPWP PENYETOR : 01.111.345.3-812.000
NAMA PENYETOR : HADJI KALLA

GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN.

ID BILLING : 0287 5499 3662 093
MASA AKTIF : 16/05/2024 08:07:08

Catatan : Apabila ada kesalahan dalam isian Kode Billing atau masa berlakunya berakhir, Kode Billing dapat dibuat kembali. Tanggung jawab isian Kode Billing ada pada Wajib Pajak yang namanya tercantum di dalamnya.

PERHITUNGAN PEMBAYARAN

- N A M A	: BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH : PROVINSI SULAWESI TENGAH		
- ALAMAT	: JL. SAM RATULANGI NO. 101, KEL. BESUSU TENGAH, KEC. : PALU TIMUR, KOTA PALU, SULAWESI TENGAH 94111		
- N.P.W.P	: 00.139.337.0-831.000		
- JENIS KENDARAAN	: NEW HILUX 2.4 G DOUBLE CABIN 4X4 M/T [EURO4] [30]		
- TOTAL HARGA (1 Unit)		Rp.	515,400,000
- Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM)	Rp.	0	
- By. notice (BBN + Surat-Surat)	Rp.	54,903,400	
- Discount	Rp.	0	
		Rp.	<u>54,903,400</u>
	Harga + PPN (11%)	Rp.	<u>460,496,600</u>
- Dasar Pengenaan PPN :			
100/111	x Rp.	460,496,600	Rp. 414,861,802
- PPN 11 %	x Rp.	414,861,802	Rp. 45,634,798
- PPh 22 1,5 %	x Rp.	414,861,802	Rp. 6,222,927
REKAPITULASI :			
Total Harga		Rp.	515,400,000
PPN	Rp.	45,634,798	
PPh 22	Rp.	6,222,927	
Discount	Rp.	0	
		Rp.	<u>51,857,725</u>
Sisa Harga yang ditransfer ke Rekening PT. Hadji Kalla		Rp.	<u><u>463,542,275</u></u>

MR0KB8CD3R1221410

Makassar, 06 April 2024

Faktur Pajak

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 020.005-24.09215850		
Pengusaha Kena Pajak		
Nama : PT HADJI KALLA Alamat : WISMA KALLA LT.12, JL. DR. SAM RATULANGI NO. 8 , KOTA MAKASSAR NPWP : 01.111.345.3-812.000		
Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama : BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH Alamat : JL. SAM RATULANGI NO. 101, KEL. BESUSU TENGAH, KEC. PALU TIMUR, KOTA PALU, SULAWESI TENGAH 94111 NPWP : 00.139.337.0-831.000		
No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
1	TOYOTA NEW HILUX 2.4 G DOUBLE CABIN 4X4 M/T [EURO4] [30] - MR0KB8CD3R1221410 Rp 414.861.802 x 1	414.861.802,00
Harga Jual / Penggantian		414.861.802,00
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Uang Muka		0,00
Dasar Pengenaan Pajak		414.861.802,00
Total PPN		45.634.798,00
Total PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)		0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.

KOTA MAKASSAR, 06 April 2024



IDAWATY IDRUS

20401SPK2404017



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Alamat : Jl. Dr. Sam Ratulangi No. 101 Palu
Telp. (0451) 421411 - 421412 Faks. (0451) 421411 - 421412

CHECK LIST KELENGKAPAN DOKUMEN

No. 72.00/02.0/000202/LS/5.02.0.00.0.00.02.0000/M/5/2024
No. 72.00/03.0/000205/LS/5.02.0.00.0.00.02.0000/M/5/2024

<u>LS (LANGSUNG) BARANG DAN JASA</u>	ADA	TIDAK ADA
1 SPM-LS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2 SURAT PENGANTAR SPP-LS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3 RINGKASAN SPP-LS	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4 RINCIAN SPP-LS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5 SURAT PERNYATAAN PENGAJUAN SPP-LS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK DARI KPA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7 SURAT PERNYATAAN VERIFIKASI KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN DOKUMEN	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8 RINGKASAN KONTRAK	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9 DOKUMEN KONTRAK	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10 FAKTUR ID-BILLING (PPN & PPh) YANG AKTIF	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11 FOTO COPY NPWP	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12 FOTO COPY REKENING KORAN	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13 RTGS (APABILA BANK YANG BERBEDA)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14 FORMULIR PEMBAYARAN	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

TANDA TERIMA :

NAMA	
TGL/BULAN/TAHUN	
PARAF	

PENGEMBALIAN KELENGKAPAN DOKUMEN :

NAMA	
TGL/BULAN/TAHUN	
PARAF	
CATATAN	

JABATAN	PARAF	TGL
PPK		6/5-24
BENDAHARA		6/5-24
KPA		6/5-24



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Alamat : Jl. Dr. Sam Ratulangi No. 101 Palu
Telp. (0451) 421411 - 421412 Faks. (0451) 421411 - 421412

SURAT PERNYATAAN PENGAJUAN SPP/SPM-LS

No. 72.00/02.0/000202/LS/5.02.0.00.0.00.02.0000/M/5/2024

No. 72.00/03.0/000205/LS/5.02.0.00.0.00.02.0000/M/5/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : ANITA SORAYA, S.STP, M.Si
NIP : 19841121 200212 2 001
Pangkat/Golongan : Pembina (IV/a)
Jabatan : Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
(Kuasa Pengguna Anggaran)

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa :

1. Perhitungan yang terdapat pada daftar untuk pembayaran langsung (LS) % Atas Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan (Kendaraan Roda Empat) Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan sesuai SPM Nomor : 72.00/03.0/000205/LS/5.02.0.00.0.00.02.0000/M/5/2024 Tanggal 06 Mei 2024 sebesar Rp 515.400.000,- (Lima Ratus Lima Belas Juta Empat Ratus Ribu Rupiah), telah dihitung dengan Benar di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Apabila dikemudian hari telah terdapat kelebihan atas pembayaran LS sesuai point (1) di atas, kami bersedia untuk menyetor kelebihan tersebut ke Kas Daerah.
3. Bukti - bukti pendukung telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang telah diarsipkan dengan baik di OPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Provinsi Sulawesi Tengah.
4. Seluruh Dokumen yang disampaikan sebagai lampiran Pengajuan Pencairan Dana adalah benar menjadi tanggung jawab kami, baik secara Hukum maupun Administrasi.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Palu, 06 Mei 2024



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK SPM-LS

Nomor: 72.00/03.0/000205/SPTJM-SPM-LS/5.02.0.00.0.00.02.0000/M/5/2024

Sehubungan dengan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) nomor 72.00/03.0/000205/LS/5.02.0.00.0.00.02.0000/M/5/2024 tanggal 06 Mei 2024 yang saya ajukan sebesar Rp515.400.000 (terbilang lima ratus lima belas juta empat ratus ribu rupiah) untuk keperluan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2024, dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

- Jumlah Langsung (LS) tersebut di atas akan dipergunakan untuk keperluan belanja kegiatan yang akan kami laksanakan sesuai DPA-SKPD.
- Bukti-bukti belanja tersebut disimpan di Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk keperluan pemeriksaan Internal/Eksternal sebagai **Bukti Pertanggungjawaban Keuangan**.

Dengan ini, saya menyatakan **bertanggung jawab penuh** atas segala pengeluaran yang dibayar lunas sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk melengkapi persyaratan pengajuan **SPM-LS SKPD** kami.

Palu, 06 Mei 2024

KUASA PENGGUNA ANGGARAN



ANITA SORAYA, S.STP.,M.Si

198411212002122002

SURAT PERNYATAAN
VERIFIKASI KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN
DOKUMEN DAN LAMPIRAN SPP-LS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **FANDY KADANG, SE**
NIP : **199202122019111001**
Jabatan : **PPK SKPD**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dokumen dan lampiran **Surat Permintaan Pembayaran LS** nomor **72.00/02.0/000202/LS/5.02.0.00.0.00.02.0000/P2/5/2024** tanggal **06 Mei 2024** telah **lengkap dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan**. Jika di kemudian hari pernyataan saya ini tidak benar, maka **saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku**.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk melengkapi persyaratan pengajuan **SPM-LS SKPD** kami.

Palu, 06 Mei 2024

PPK SKPD



FANDY KADANG, SE

199202122019111001

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
SURAT PERINTAH MEMBAYAR
LANGSUNG (LS)

Tahun Anggaran: 2024

KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

Supaya menerbitkan SP2D kepada:

Nama SKPD : Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
Nama Unit SKPD : Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
Nama : PT.HADJI KALLA CAB.PALU
No. Rekening Bank : 0010107104661
Nama di Rekening Bank : PT.HADJI KALLA CAB.PALU
Nama Bank : Bank BPD SULAWESI TENGAH
NPWP : 011113453812000
Dasar Pembayaran : 72.00/01.0/000001/5.02.0.00.0.00.02.0000/P1/3/2024

Untuk keperluan:

Pembayaran Langsung (LS) atas Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan (Kendaraan Roda Empat) pada Sub Keg. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan TA. 2024

Pembebanan Pada:

KODE REKENING	URAIAN	NILAI
NOMOR SPD: 72.00/01.0/000001/5.02.0.00.0.00.02.0000/P1/3/2024		
5.02.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
5.02.01.1.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	Rp135.910.000
NOMOR SPD: 72.00/01.0/000002/5.02.0.00.0.00.02.0000/P1/3/2024		
5.02.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
5.02.01.1.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	Rp379.490.000
	Jumlah	Rp515.400.000

Jumlah SPP Diminta

Rp515.400.000

Nomor dan Tanggal SPP :

72.00/02.0/000202/LS/5.02.0.00.0.00.02.0000/P2/5/2024, tanggal 06 Mei 2024

Nomor SPM: 72.00/03.0/000205/LS/5.02.0.00.0.00.02.0000/M/5/2024

Potongan-Potongan:

No.	Uraian	ID Billing	Jumlah
1	Pajak Pertambahan Nilai	0288 5775 9740 131	Rp45.634.798
2	Pajak Penghasilan Ps 22	0288 5778 3476 000	Rp6.222.927
		Jumlah	Rp51.857.725

SPM Yang Dibayarkan

Jumlah Yang Diminta (Bruto)	Rp515.400.000
Jumlah Potongan	Rp51.857.725
Jumlah Netto	Rp463.542.275
Jumlah Yang Dibayarkan	Rp515.400.000

Uang Sejumlah: (lima ratus lima belas juta empat ratus ribu rupiah)



SPM ini sah apabila telah ditandatangani dan di stempel oleh Kuasa Pengguna Anggaran

PROVINSI SULAWESI TENGAH
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)
NOMOR 72.00/02.0/000202/LS/5.02.0.00.0.00.02.0000/P2/5/2024

<u>Langsung Barang dan Jasa</u>		
SPP - LS		
1.	Nama SKPD	: Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
2.	Nama Unit SKPD	: Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
3.	Kode dan Nama Sub Kegiatan	: Terlampir
4.	Nama Kuasa Pengguna Anggaran	: ANITA SORAYA, S.STP.,M.Si
5.	Nama PPTK	: ALDI RENALDI, SE.,MM
6.	Nama Bendahara Pengeluaran Pembantu	: Ramon Madriawan
7.	NPWP Bendahara Pengeluaran Pembantu	: 001393370831000
8.	Nama Bank	: Bank BPD SULAWESI TENGAH
9.	Nomor Rekening Bank	: 0010103002000
10.	Nama di Rekening Bank	: BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU BPKAD PROV SULTENG
11.	Untuk Keperluan	: Pembayaran Langsung (LS) atas Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan (Kendaraan Roda Empat) pada Sub Keg. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan TA. 2024
12.	Dasar Pengeluaran	SPD Nomor : 72.00/01.0/000001/5.02.0.00.0.00.02.0000/P1/3/2024 Tanggal : 15 Januari 2024
		Sebesar : Rp551.951.226.189 Terbilang : lima ratus lima puluh satu milyar sembilan ratus lima puluh satu juta dua ratus dua puluh enam ribu seratus delapan puluh sembilan rupiah

No	Uraian		
I	SPD		
	Tanggal: 15 Januari 2024	Nomor: 72.00/01.0/000001/5.02.0.00.0.00.02.0000/P1/3/2024	Rp551.951.226.189
II	SP2D Sebelumnya		
	Tanggal: -	Nomor: -	-

Pada SPP ini ditetapkan lampiran-lampiran yang diperlukan sebagaimana tertera pada daftar kelengkapan dokumen SPP ini.

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN


ALDI RENALDI, SE., MM
198304122008011008

Palu, 06 Mei 2024

BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU


Ramon Madriawan
198103202016041001

Lembar Asli : Untuk Pengguna Anggaran/PPK-SKPD
Salinan 1 : Untuk Kuasa BUD
Salinan 2 : Untuk Bendahara Pengeluaran
Salinan 3 : Untuk Arsip Bendahara Pengeluaran

PROVINSI SULAWESI TENGAH
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)
NOMOR 72.00/02.0/000202/LS/5.02.0.00.0.00.02.0000/P2/5/2024
TAHUN ANGGARAN 2024

RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN

No	Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	NOMOR SPD: 72.00/01.0/000001/5.02.0.00.0.00.02.0000/P1/3/2024		
2	5.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
3	5.02.01.1.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
4	5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	Rp135.910.000
5	NOMOR SPD: 72.00/01.0/000002/5.02.0.00.0.00.02.0000/P1/3/2024		
6	5.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
7	5.02.01.1.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
8	5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	Rp379.490.000
Jumlah:			Rp515.400.000

Terbilang: lima ratus lima belas juta empat ratus ribu rupiah

Mengetahui/Menyetujui,
KUASA PENGGUNA ANGGARAN



ANITA SCRAYA, S.STP., M.Si
198411212002122002

Palu, 06 Mei 2024
BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU



Ramon Madriawan
198103202016041001



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jln. Dr. Sam Ratulangi No. 101 Palu 94111
Telp.(0451) 421411 – 421412 Faks. (0451) 421412 – 421411
Email : info@sultengprov.go.id, website : www.sultengprov.go.id

KWITANSI

SUDAH TERIMA DARI : Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

TERBILANG :

Lima Ratus Lima Belas Juta Empat Ratus Ribu Rupiah

UNTUK

: Pembayaran Langsung (LS) atas Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan (Kendaraan Roda Empat) pada Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Tahun Anggaran 2024

No.SP : 027/6400/SP.I/BPKAD/2024

Tanggal : 05 April 2024

UANG SEJUMLAH :

Rp515.400.000

Palu, 6 Mei 2024

Setuju Bayar ;
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

ALDI RENALDI, SE, MM
Nip. 19830412 200801 1 008

Yang Menerima
PT. HADJI KALLA



RIZAL NURDIN
Branch Manager

Lunas Bayar ;
Bendahara Pengeluaran

SITI ZAHRA, SE
Nip. 19771205 201001 2 003

Lunas Bayar ;
Bendahara Pengeluaran Pembantu

RAMON MADRIAWAN, SH
Nip. 19810320 201604 1 001

Mengetahui / Menyetujui
Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran



ANITA SONAYA, S.STP., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19841121 200212 2 001



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jln. Dr. Sam Ratulangi No. 101 Palu 94111
Telp. (0451) 421411 – 421412 Faks. (0451) 421412 – 421411
Email : info@sultengprov.go.id, website : www.sultengprov.go.id

BERITA ACARA PEMBAYARAN

Nomor : 028 / 7811 / Eptkad / 2024

Pada hari ini Senin Tanggal Enam Bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat ,
kami yan bertanda tangan dibawah ini masing-masing :

- Nama : ANITA SORAYA, S.STP., M.Si
Jabatan : Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran
Alamat : Jl. DR. Sam Ratulangi No. 101 Palu
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA
- Nama : RIZAL NURDIN
Jabatan : Branch Manager PT. HADJI KALLA
Alamat : Kalla Toyota Jl. Juanda No. 45 Kota Palu
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Berdasarkan :

- DPA-SKPD Nomor : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2024 Tanggal : 05 Januari 2024
- No. SPD : 72.00/01.0/000001/5.02.0.00.0.00.02.0000/M Tanggal : 15 Januari 2024 /1/2024
- SP Nomor : 027/6400/SP.I/BPKAD/2024 Tanggal : 05 April 2024
- Nama Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Nama Sub Kegiatan : Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Dengan ini menyatakan :

Sesuai Surat Pesanan untuk mengadakan/melakukan pekerjaan/barang yaitu : Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan (Kendaraan Roda Empat) pada Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah telah diterima dalam keadaan baik dan lengkap.

Maka PIHAK KEDUA berhak menerima pembayaran dari PIHAK PERTAMA dengan rincian sebagai berikut :

- | | | | |
|----------------------------|-----|-------------|---|
| 1. Nilai Pekerjaan | Rp. | 515.400.000 | ✓ |
| 2. Dibayarkan sekarang ini | Rp. | 515.400.000 | |
| 3. Sisa | Rp. | - | |

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

PIHAK PERTAMA:

Secretaris BPKAD
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran,


ANITA SORAYA, S.STP., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19841121 200212 2 001

PIHAK KEDUA:

PT. HADJI KALLA


KALLA TOYOTA
JUANDA

RIZAL NURDIN
Branch Manager



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jln. Dr. Sam Ratulangi No. 101 Palu, 94111

Telp. (0451) 421411-421412 Faks. (0451) 421412-421411

Email : info@sultengprov.go.id website : www.sultengprof.go.id

SURAT PESANAN

SURAT PESANAN (SP)	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
	Nomor SP : 027/6400/SP.I/BPKAD/2024 Tanggal SP : 05 April 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ANITA SORAYA, S.STP,M.Si**

Jabatan : *Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)*

Alamat : *Jl. Dr. Samratulangi No. 101 Palu*

Selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian;

Nama : **PT. HADJI KALLA CABANG JUANDA PALU**

Alamat : *Kalla Toyota Jl. Juanda No. 45 Kota Palu*

Yang dalam hal ini diwakili oleh : **RIZAL NURDIN**

selanjutnya disebut sebagai **Penyedia**;

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Rincian Barang

Daftar Produk PAKET KB2-P2404-9023568

No.	Jenis Barang	Kuantitas	Mata Uang	Tanggal Pengiriman Produk	Tanggal Pengiriman Produk	Total (Rp.)
1	4912100002-KB2-187529577 TOYOTA HILUX 2.4 DC G (4x4) M / T - VIN 2024	1	IDR	Rp 515.400.000,00	05 April S.d 03 Mei 2024	Rp 515.400.000,00

TERBILANG : Lima Ratus Lima Belas Juta Empat Ratus Ribu Rupiah

SYARAT DAN KETENTUAN:

1. Hak dan Kewajiban

a. Penyedia

- 1) Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
- 2) Penyedia memiliki kewajiban:
 - a) tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
 - b) tidak menjual barang melalui *e-Purchasing* lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui *e-Purchasing* pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;
 - c) mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada (tanggal/bulan/tahun) sejak SP ini diterima oleh Penyedia;
 - d) bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - e) mengganti barang setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui team pendukung melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:
 - d.1 barang rusak akibat cacat produksi;
 - d.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 - d.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.

- f) memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
- g) memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.

b. PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN

- 1) Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:
 - a) menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.
 - b) mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - c) mendapatkan penggantian barang, dalam hal:
 - d.1 barang rusak akibat cacat produksi;
 - d.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 - d.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - d) Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - e) Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.
- 2) Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban:
 - a) melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan
 - b) memeriksa kualitas dan kuantitas barang;
 - f) memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).

2. Waktu Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan lay sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada **(03/05/2024)** sejak SP ini diterima oleh Penyedia.

3. Alamat Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut:

Jl. Prof. Dr. Moh. Yamin (Gedung Dharma Wanita/Kantor Sementara BPKAD)

4. Tanggal Barang Diterima

Barang diterima pada **(03/05/2024)** *Tiga Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat* ✓

5. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang

- a. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui team pendukung menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
- b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa:
 - d.1 barang rusak akibat cacat produksi;
 - d.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 - d.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.

Maka Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.

- c. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.
- d. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.

e. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya (14) hari kerja.

6. Harga

- a. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.
- b. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya *overhead*, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.
- c. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

7. Perpajakan

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.

8. Pengalihan dan/atau subkontrak

- a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*), konsolidasi, atau pemisahan.
- b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi; dan
 - 2) Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.

9. Perubahan SP

- a. SP hanya dapat diubah melalui adendum SP.
- b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

10. Peristiwa Kompensasi

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian terlambat melakukan pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia.
- b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dikenakan ganti rugi atas keterlambatan pembayaran sebesar [*sesuai kesepakatan para pihak*].

11. Hak Atas Kekayaan Intelektual

- a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
- b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.

12. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.
- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut

selama Masa Layanan Purnajual.

- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia.

13. Pembayaran

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan:
 - 1) penyedia telah mengajukan tagihan;
 - 2) pembayaran dilakukan dengan ***secara sekaligus***; dan
 - 3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- c. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya (10) hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.

14. Sanksi

- a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
 - 1) Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya (14) hari kerja;
 - 2) Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui *e-Purchasing* dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
 - 3) menjual barang melalui proses *e-Purchasing* dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui *e-Purchasing* pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.
- b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
 - 1) peringatan tertulis;
 - 2) denda; dan
 - 3) pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
 - a) penghentian sementara dalam sistem transaksi *e-Purchasing*; atau
 - b) penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (*e-Catalogue*).
- c. Tata Cara Pengenaan Sanksi
Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang *e-Purchasing*.

15. Penghentian dan Pemutusan SP

- a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
 - 1) Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SP apabila:
 - a) kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;
 - b) berdasarkan penelitian Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;

- c) setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - d) Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - e) Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - f) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
- 2) Keputusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya (10) Hari kerja setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana keputusan SP secara tertulis kepada Penyedia.

c. Keputusan SP oleh Penyedia

- 1) Penyedia dapat melakukan keputusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
- a) akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau addendum SP;
 - b) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
 - c) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Addendum SP.
- 2) Keputusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya (14) kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana keputusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

16. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan

sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga atau dari sebagian total harga sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.

17. Keadaan Kahar

- a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
- b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.

18. Penyelesaian Perselisihan

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

19. Larangan Pemberian Komisi

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

20. Masa Berlaku SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama
Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
Pejabat Penandatanganan/Pengesahan
Tanda Bukti Perjanjian



ANITA SORAYA, S.STP,M.Si

Pembina

NIP : 19841121 200212 2 001

Untuk dan atas nama
Penyedia Jasa
PT. HADJI KALLA CABANG JUANDA PALU



RIZAL NURDIN
Branch Manager



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Alamat : Jl. Dr. Sam Ratulangi No. 101 Palu Telp. (0451) 421411 - 421412 - 421812
PALU

Kode Pos : 94111

BERITA ACARA PEMERIKSAAN PENGADAAN HASIL BARANG/JASA

Nomor : **62.09.12**

/P2BD/BA-PPHBJ/BPKAD/2024

Pada hari **Rabu**, Tanggal **Tujuh Belas** Bulan **April**
bertanda tangan dibawah ini masing-masing :
berdasarkan :

Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, yang

Nama : RAHMAT. MUH.F. PUTERA., S.IP. M.SI
NIP : 19810219 200701 1 005
Jabatan : PENGURUS BARANG

Berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi tengah Nomor : 000.3.5/42/BPKAD-G.ST/2024 Penetapan Pejabat Penatausahaan Barang Pengelola, Pengurus Barang Pengelola, Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Barang, Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang dan Pengurus Barang Pengguna serta Pengurus Barang Pembantu Tahun 2024.

Nama Kegiatan/Pengadaan : Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan (Kendaraan Roda Empat)
Program/Sub. Kegiatan : Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Tahun Anggaran 2024
Nomor SPK/Surat Pesanan : 027/6400/SP.I/BPKAD/2024
Tanggal SPK : 05 April 2024
Nilai Kontrak : Rp. 515.400.000,.
Penyedia : PT. HADJI KALLA CABANG JUANDA PALU
Alamat Penyedia : Kalla Toyota Jalan Juanda No. 45 Kota Palu

1 Bahwa pelaksanaan pekerjaan **Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 4 (Empat)** untuk keperluan **Bidang Sekretariat**, telah mencapai prestasi dengan Laporan Akhir sesuai dengan ketentuan dalam Surat Perintah Kerja, dan telah memenuhi syarat yang ditetapkan.

2 Bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut diatas, **PT. HADJI KALLA CABANG JUANDA PALU** selaku penyedia, telah mencapai prestasi pekerjaan 100% dan berhak mendapatkan pembayaran 100% atas pekerjaan tersebut.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palu, **17 April** 2024

PEMERIKSA BARANG

RAHMAT. MUH.F.PUTERA, S.IP, M.SI
NIP. 19810219 200701 1 005

Penyedia
PT. HADJI KALLA CABANG JUANDA PALU

KALLA TOYOTA
JUANDA

RIZAL NURDIN
Branc Manager

Kuasa Pengguna Anggaran,
(KPA)

ANITA SORAYA, S.STP, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19841121 200212 2 001



LAMPIRAN BERITA ACARA PEMERIKSAAN PENGADAAN BARANG/JASA

Nomor : **02.09.V**

/P2BD/BA-PPHBJ/BPKAD/2024

No.	Jenis Barang	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)	Bobot
1	2	3	4	5	6	7
	PENGADAAN KENDARAAN DINAS RODA 4 :					
1	TOYOTA HILUX 2.4 DC G (4x4) M/T - VIN 2024	1	Unit	515.400.000	515.400.000	
					Rp 515.400.000	
<i>Lima Ratus Lima Belas Juta Empat Ratus Ribu Rupiah</i>						

Palu,

17 April

2024

PENYEDIA
PT. HADJI KALLA CABANG JUANDA PALU

KALLA TOYOTA
JUANDA

RIZAL NURDIN
Branch Manager

PEMERIKSA BARANG

RAHMAT. MUH.F.PUTERA. S.IP, M.SI
NIP. 19810219 200701 1 005

Mengetahui,
Kuasa Pengguna Anggaran





PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Alamat : Jl. Dr. Sam Ratulangi No. 101 Palu Telp. (0451) 421411 - 421412 - 421812
PALU

Kode Pos : 94111

BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN

Nomor : **02.09.IV** /P2BD/BA-STBP/BPKAD/2024

Pada hari **Rabu**, Tanggal **Tujuh belas** Bulan **April** Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ANITA SORAYA, S.STP, M.Si**
NIP : 19841121 200212 2 001
Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran Selaku Pejabat Pembuat Komitmen
Alamat : P a l u
Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA,**

Nama : **RIZAL NURDIN**
Jabatan : Branc Manager
Nama Perusahaan : PT. HADJI KALLA CABANG JUANDA PAL
Alamat : Kalla Toyota Jalan Juanda No. 45 Kota Palu
Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA,**

Kedua belah pihak dengan ini menerima hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa berdasarkan :

1. Surat Perintah Kerja (SPK)/Nota Pesanan/Kontrak
Nomor : 027/6400/SP.I/BPKAD/2024
Tanggal : 05 April 2024
2. Berita Acara Pemeriksaan Pengadaan Barang/Jasa
Nomor : **02.09.IV** /P2BD/BA-PPHBJ/BPKAD/2024
Tanggal : **17 April** 2024

dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

PIHAK KEDUA menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA dan PIHAK PERTAMA menyatakan menerima dari PIHAK KEDUA atas hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan sebagai berikut :

1. Pekerjaan : Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan (Kendaraan Roda Empat)
2. Kegiatan : Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Tahun Anggaran 2024
3. Lokasi : Jl. Sam Ratulangi No. 101 Palu
- 4 Instansi/Unit : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Pasal 2

Penyerahan sebagaimana dimaksud Pasal 1 berupa pekerjaan pada Tahun Anggaran 2024, untuk keperluan Bidang Sekretariat dengan rincian sebagaimana terlampir dalam berita acara ini.

Pasal 3

Dengan adanya serah terima ini maka selanjutnya tanggung jawab atas hasil pekerjaan tersebut beralih dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA.

Palu, **17 April** 2024

PIHAK KEDUA,
PT. HADJI KALLA CABANG JUANDA PALU

KALLA TOYOTA
JUANDA

RIZAL NURDIN
Branc Manager

PEMERINTAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
(PPK)
ANITA SORAYA, S.STP, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19841121 200212 2 001

LAMPIRAN BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG/PEKERJAAN

Nomor : **02.09. IV**

/P2BD/BA-STBP/BPKAD/2024

No.	Uraian Pekerjaan	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7
	PENGADAAN KENDARAAN DINAS RODA 4 :					
1	TOYOTA HILUX 2.4 DC G (4x4) M/T - VIN 2024	1	Unit	515.400.000	515.400.000	
					Rp 515.400.000	↙
<i>Lima Ratus Lima Belas Juta Empat Ratus Ribu Rupiah</i>						

Palu,

17 April

2024

Penyedia
PT. HADJI KALLA CABANG JUANDA PALU

**KALLA TOYOTA
JUANDA**

RIZAL NURDIN
Branc Manager



PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
(PPK)

ANITA SORAYA, S.STP, M.SI

Pembina Tingkat I

NIP. 19841121 200212 2 001



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Alamat : Jl. Dr. Sam Ratulangi No. 101 Palu Telp. (0451) 421411 - 421412 - 421812
PALU

Kode Pos : 94111

LAMPIRAN : BERITA ACARA PEMERIKSAAN ADMNISTRASI PENGADAAN BARANG/JASA
Nomor : 027/6400/SP.I/BPKAD/2024
Tanggal : 05/04/2024

No	Jenis Dokumen	Lengkap/ Seusai (v)	Tidak Lengkap/ Tidak Sesuai (v)	Keterangan
1	Dokumen Program/Penganggaran			
2	Surat Penetapan PPK			
3	Dokumen Perencanaan Pengadaan			
4	Program Kegiatan di DPA sudah di Input dalam SIRUP sesuai DPA			
5	Dokumen Persiapan Pengadaan			
	- RAB / HPS			(apabila ada)
	- Spesifikasi Teknis /Kerangka Acuan Kerja			(apabila ada)
	- Gambar Rencana			(apabila ada)
6	Dokumen Pemilihan Penyedia			(apabila ada)
7	Dokumen Kontrak			
8	Dokumen Serah Terima Pekerjaan			
	- Surat Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan			
	- Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan			
	- Berita Acara Serah Terima Pekerjaan			
9	Dokumen Lain yang diperoleh			(apabila ada)

Palu, 17 April 2024

Mengetahui,
Kuasa Pengguna Anggaran



ANITA SORAYA, S.STP, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19841131 200212 2 001

PEMERIKSA BARANG



RAHMAT. MUH.F.PUTERA, S.IP, M.SI
NIP. 19810219 200701 1 005



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jln. Dr. Sam Ratulangi No. 101 Palu 94111
Telp.(0451) 421411 – 421412 Faks. (0451) 421412 – 421411
Email : info@sultengprov.go.id, website : www.sultengprov.go.id

Palu, 28 Maret 2024

Kepada Yth.

Nomor :
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (Satu) berkas.
Perihal : **Membantu Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah untuk Melaksanakan Proses Pengadaan Barang/Jasa dan Pemilihan Penyedia melalui E-Katalog/E-Purchasing**

Sdr. David
Selaku Pejabat Pengadaan Barang/Jasa
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan (Kendaraan Roda Empat)

di
Palu

1. Dasar :

- a. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2024

Nomor :
Tanggal :

- b. Sub Kegiatan : Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
c. Pekerjaan : Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan (Kendaraan Roda Empat)
d. Kode RUP : 48742259
e. Sumber Dana : **APBD TAHUN ANGGARAN 2024**
Pagu Anggaran : Rp 515.400.000
Total HPS : Rp 515.400.000 ✓
f. Terbilang : *Lima Ratus Lima Belas Juta Empat Ratus Ribu Rupiah*

2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas pada butir 1 (satu) diatas, maka dengan ini disampaikan kepada Saudara agar segera mengambil langkah-langkah persiapan untuk melaksanakan proses Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan (Kendaraan Roda Empat) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

3. Demikian disampaikan untuk diproses selanjutnya.

An. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH
SEKRETARIS SELAKU
KUASA PENGGUNA ANGGARAN


ANITA SORAYA, S.STP., M.Si
Rembina
NIP. 19841121 200212 2 001



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jln. Dr. Sam Ratulangi No. 101 Palu 94111
Telp. (0451) 421411 – 421412 Faks. (0451) 421412 – 421411
Email : info@sultengprov.go.id, website : www.sultengprov.go.id

HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)

Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan : Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Pekerjaan : Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan (Kendaraan Roda Empat)
Lokasi : Jalan Moh. Yamin No. Kota Palu
Sumber Dana : APBD TAHUN ANGGARAN 2024
Pagu Anggaran : Rp 2.786.110.000
Jumlah HPS : Rp 515.400.000
Tahun Anggaran : 2024

No.	Uraian	Spesifikasi	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah
1	2	3	4	5	6 = (4x5)
1	Kendaraan Roda 4	Spesifikasi : Hilux Double Cabin 2.4 G (4x4) M/T Diesel	1 Unit	Rp 515.400.000	Rp 515.400.000
Jumlah Sudah Termasuk PPN 11%					Rp 515.400.000
TERBILANG		: Lima Ratus Lima Belas Juta Empat Ratus Ribu Rupiah			

Palu, 28 Maret 2024

An. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH
SEKRETARIS SELAKU
KUASA PENGGUNA ANGGARAN


ANITA SORAYA, S.STP., M.Si
Pembina
NIP. 198411212002122001



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jln. Dr. Sam Ratulangi No. 101 Palu 94111
Telp.(0451) 421411 – 421412 Faks. (0451) 421412 – 421411
Email : info@sultengprov.go.id, website : www.sultengprov.go.id

SPESIFIKASI BARANG

Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan : Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Pekerjaan : Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan (Kendaraan Roda Empat)
Lokasi : Jalan Moh. Yamin No. Kota Palu
Sumber Dana : APBD TAHUN ANGGARAN 2024
Jumlah Pagu Anggaran : Rp 2.786.110.000
Jumlah HPS : Rp 515.400.000
Tahun Anggaran : 2024

No.	Uraian	Spesifikasi	Volume
1	2	3	4
1	Kendaraan Roda 4	Spesifikasi : Hilux Double Cabin 2.4 G (4x4) M/T Diesel	1 Unit

Palu, 28 Maret 2024

An. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH
SEKRETARIS SELAKU
KUASA PENGGUNA ANGGARAN


ANITA SORAYA, S.STP., M.Si
Pembina
NIP. 19841121 200212 2 001



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jln. Dr. Sam Ratulangi No. 101 Palu 94111

Telp.(0451) 421411 – 421412 Faks. (0451) 421412 – 421411

Email : info@sultengprov.go.id, website : www.sultengprov.go.id

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Program	:	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
Kegiatan	:	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub. Kegiatan	:	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Organisasi	:	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
Nama Paket	:	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan (Kendaraan Roda Empat)
Jumlah Pagu	:	Rp. 2.786.110.000,- (Dua Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh
Jumlah HPS	:	Enam Juta Seratus Sepuluh Ribu Rupiah) Rp. 515.400.000,- (Lima Ratus Lima Belas Juta Empat Ratus Ribu Rupiah)
Tahun Anggaran	:	2024

TAHUN ANGGARAN 2024

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Program	: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
Kegiatan	: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub. Kegiatan	: Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Organisasi	: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
Nama Paket	: Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan (Kendaraan Roda Empat)
Jumlah HPS	: Rp. 515.400.000,- (Lima Ratus Lima Belas Juta Empat Ratus Ribu Rupiah)
Tahun Anggaran	: 2024

-
- LATAR BELAKANG** : Untuk memenuhi kebutuhan di lapangan, sebagai alat angkut/transportasi berupa mobil angkutan, fasilitas penunjang juga sangat dibutuhkan dalam upaya untuk memperlancar dan mempermudah pelaksanaan tugas-tugas dan kegiatan Kunjungan Tamu Lembaga, Kementerian, Pemerintah Daerah dan Institusi. Dalam mengemban tugas dan fungsinya aparatur memiliki lingkup dan frekwensi yang signifikan serta mobilitas kegiatan yang relatif tinggi. Oleh karena itu guna mendukung efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut harus didukung sarana yang memadai, antara lain tersedianya jumlah kendaraan dinas yang memadai dan senantiasa terpelihara dengan baik sehingga kondisinya layak dan memenuhi syarat.
Kendaraan dinas yang diperuntukkan bagi Kendaraan Dinas/Operasional sangat penting peranannya sehingga apabila ketersediaan kendaraan dinas ini tidak ada atau tidak layak maka akan berpengaruh terhadap kinerja aparat dan pelayanan terhadap publik.
 - MAKSUD DAN TUJUAN** :
 - Maksud
Untuk Sebagai sarana/alat bantu operasional angkutan/transportasi mobil angkutan ke lokasi tujuan / kegiatan lapangan. Guna memberikan ketersediaan peralatan/fasilitas yang memenuhi persyaratan keselamatan dan efisiensi serta efektivitas dalam pemanfaatannya
 - Tujuan
Menambah Kebutuhan Operasional angkutan kendaraan dan efisiensi pekerjaan. terwujudnya pemanfaatan Kendaraan yang memenuhi persyaratan keselamatan, kenyamanan, kemudahan dan efisiensi serta efektivitas dalam pelayanan.
 - TARGET/ SASARAN** : Memenuhi /meningkatkan kinerja dan mempercepat proses Pelayanan Pimpinan.
 - LINGKUP PEKERJAAN** : Lingkup Pekerjaan adalah Pengadaan Kendaraan Dinas kebutuhan Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Unit kendaraan yang diadakan sebanyak 4 (Empat) unit yang merupakan Kendaraan Baru (Brand New) Tahun Pembuatan/Perakitan 2024 dalam keadaan baik serta layak jalan/operasi (siap pakai) dengan Nomor Polisi a.n Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Wilayah Sulawesi Tengah (DN)

5. NAMA ORGANISASI PENGADAAN BARANG : Nama organisasi yang menyelenggarakan/melaksanakan pengadaan barang:
- a. K/L/D/I : Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
- b. Satker/OPD : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
- c. PA : BAHARAN, SE, MM
- d. KPA : ANITA SORAYA, S.STP., M.Si
6. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA : a. Sumber Dana : Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2024
- b. Total perkiraan biaya yang diperlukan : Rp. 515.400.000,- (Lima Ratus Lima Belas Juta Empat Ratus Ribu Rupiah)
7. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN : 30 (Tiga Puluh) Hari Kalender, terhitung sejak ditandatanganinya kontrak pada Tahun 2024.
8. SPESIFIKASI TEKNIS : Spesifikasi barang yang di adakan meliputi:

No.	Uraian	Spesifikasi	Volume
1	2	3	4
1	Kendaraan Roda 4	Spesifikasi : Hilux Double Cabin 2.4 G (4x4) M/T Diesel	1 Unit

9. TEKNIS PELAKSANAAN PEKERJAAN :
- A. Kondisi kendaraan adalah baru pembuatan/perakitan tahun 2023 dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan standard pabrikan dan dalam kondisi baik serta layak jalan/operasi (siap pakai).
- B. Kendaraan dilengkapi surat-surat yang sah antara lain :
- I. STNK atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dengan Nomor Polisi disesuaikan dengan domisili unit kendaraan dipakai yaitu Sulawesi Tengah.
- II. Seluruh kendaraan harus dilengkapi dengan kelengkapan peralatan antara lain : ban cadangan, dongkrak, kunci roda, tool-kit, segitiga pengaman, kotak obat P3K dan perlengkapan lainnya Meliputi : Riben/kaca film, Bingkai Plat, Talang Air, Pompa Ban Elektrik, Kabel Jumper, Tali Derek dan Dompot Surat-Surat.
- III. Ban Kendaraan yang digunakan adalah ban baru 100% dan bukan vulkanisir dengan merk ban "Dunlop, Michelin atau Bridgestone".
- IV. Penyedia wajib memberikan Garansi Service Pemeliharaan/Preventive Maintenance Service yang dilakukan disesuaikan dengan instruksi manual book selama 3 Tahun/50.000.KM.
- V. Pelaksana Pekerjaan Wajib mengurus segala macam perizinan dan atau legalitas lainnya yang berdasarkan ketentuan menjadi tanggung jawabnya yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan dimaksud dalam perjanjian ini sedemikian rupa dari pejabat berwenang, baik dari Pemerintah Daerah maupun Instansi Pemerintah terkait tepat pada waktunya, sehingga menjamin terselesaikannya pekerjaan sesuai jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang

- telah disepakati.
- VI. Penyerahan kendaraan di laksanakan di Lokasi Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Jl. Moh. Yamin No Kota Palu
10. DATA DUKUNG BAGI PELAKSANAAN PENGADAAN :
- a. Memenuhi ketentuan peraturan perundangan untuk menjalankan usaha/kegiatan sebagai mitra berbentuk Perseroan Terbatas (PT) antara lain Akta Perusahaan, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak).
 - b. Memiliki Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) pada bidang usaha Penyedia/Jual Kendaraan, yang masih berlaku yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah yang berwenang dengan Kualifikasi Non Kecil dan Klasifikasi Perdagangan Besar Mobil Baru KBLI 2017 (G 45101).
 - c. Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) atau Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah yang berwenang yang masih berlaku.
 - d. Memiliki Surat Penunjukkan sebagai Main Dealer Resmi yang diterbitkan oleh Agen Tunggal Pemegang Merk (ATPM).
 - e. Pernah menangani pekerjaan/proyek yang mirip/serupa di Indonesia dalam industri penjualan kendaraan dan memiliki pengalaman dalam pekerjaan yang ditawarkan dalam 4 tahun terakhir.
 - f. Mempunyai Dealer resmi untuk Penjualan dan Service kendaraan roda 4 serta memiliki ketersediaan suku cadang untuk kendaraan roda empat.
 - g. Tidak masuk dalam *blacklist* akibat *trackrecord* yang buruk dalam proses pengadaan barang/jasa.
 - h. Pekerjaan ini tidak boleh di sub kontrakkan.
11. PEMERIKSAAN : Sebelum proses serah terima dilakukan, Pihak Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam hal ini Kuasa Pengguna Anggaran akan melaksanakan pemeriksaan fisik kendaraan yang antara lain meliputi pemeriksaan kelayakan, kondisi dan perlengkapan peralatan maupun surat- surat dan kelengkapan dokumen peralatan sebelum unit kendaraan diserahkan. Setelah seluruh pemeriksaan selesai dan dinyatakan sesuai dengan persyaratan, maka selanjutnya akan dilakukan serah terima unit di lokasi Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dengan menandatangani Berita Acara Serah Terima Unit (BAST) oleh Kedua Belah PIHAK
12. PERIZINAN : Semua biaya perijinan instansi yang berwenang adalah menjadi beban dan merupakan tanggungan Pelaksana Pekerjaan sepenuhnya. Pelaksana Pekerjaan wajib melengkapi dokumen dan segala sesuatu yang diperlukan untuk memperoleh izin tersebut termasuk namun tidak terbatas pada STNK & Nomor Polisi dan Plat Kendaraan.
13. LAIN-LAIN :
- a. Apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan, peraturan, pedoman dan kebijakan pemerintah yang berlaku maka segala sesuatu yang termasuk di dalam.
 - b. Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini akan diteliti dan ditinjau kembali.
 - c. Hal-hal yang belum di atur dalam KAK ini akan ditetapkan lebih lanjut.

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat sebagai dasar dalam pelaksanaan kegiatan Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan (Kendaraan Roda Empat).

Palu, 28 Maret 2024.

A.n Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Sekretaris Selaku

Kuasa Pengguna Anggaran



[Handwritten signature]

ANITA SORAYA, S.STP., M.Si

Pembina

NIP. 19841121 200212 2 001

Informasi Riwayat Negosiasi

ID Paket : KB2-P2404-9023568

Nama Paket : Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan

1. Harga Awal

Tanggal Revisi : 5 April 2024

Total Harga Paket : Rp 515.400.000,00

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Kesepakatan			Total Harga
			Harga Satuan	Tanggal Pengiriman Produk	Catatan Tambahan	
HILUX 2.4 DC G (4x4) M / T - VIN 2024	1.00	IDR	Rp 515.400.000,00		Menyesuaikan	Rp 515.400.000,00

2. Rev. 1

Tanggal Revisi : 5 April 2024

Total Harga Paket : Rp 515.000.000,00

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Kesepakatan			Total Harga
			Harga Satuan	Tanggal Pengiriman Produk	Catatan Tambahan	
HILUX 2.4 DC G (4x4) M / T - VIN 2024	1.00	IDR	Rp 515.000.000,00	3 Mei 2024	Menyesuaikan	Rp 515.000.000,00

3. Rev. 2

Tanggal Revisi : 5 April 2024

Total Harga Paket : Rp 515.400.000,00

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Kesepakatan			Total Harga
			Harga Satuan	Tanggal Pengiriman Produk	Catatan Tambahan	
HILUX 2.4 DC G (4x4) M / T - VIN 2024	1.00	IDR	Rp 515.400.000,00	3 Mei 2024	Menyesuaikan	Rp 515.400.000,00

Ini merupakan informasi riwayat negosiasi paket, bukan surat.

